



LAPORAN PENELITIAN

TINJAUAN PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN
AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT PULAU
KODINGARENG LOMPO UNTUK MENCIPTAKAN GENERASI INDONESIA
EMAS 2045

**ALSA CARE & LEGAL
COACHING CLINIC 2024**



TINJAUAN PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT PULAU KODINGARENG LOMPO UNTUK MENCIPTAKAN GENERASI INDONESIA EMAS 2045

Tim Peneliti *Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter* Universitas Hasanuddin

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pedoman mendasar yang diperlukan oleh setiap individu untuk melangsungkan kehidupan yang bermartabat, sejahtera, dan layak. Sebagai mata angin yang memberikan arah bagi kehidupan, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk Masyarakat yang maju, cerdas, dan berdaya saing. Salah satu tokoh terkenal, yakni Nelson Mandela, menyatakan bahwa “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia”.¹ Dalam hal ini, menurutnya pendidikan merupakan kunci yang paling utama dalam membuka peluang ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas serta mengubah masa depan bagi setiap individu.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melalui konsep *The Four Pillars of Education*, menetapkan empat pilar utama sebagai pedoman pendidikan dalam skala global, yakni pembelajaran sepanjang hayat, penciptaan Masyarakat berwawasan global, pendidikan untuk keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan, serta kewarganegaraan global dan perdamaian.² Implementasi ke-4 pilar ini berpotensi menciptakan peradaban baru yang mampu bersaing bagi seluruh negara di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, urgensi mengenai pentingnya pendidikan juga telah ditegaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkewajiban untuk menempuh pendidikan dasar, sementara pemerintah bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar

¹ Usboko K, ‘MODEL PENDIDIKAN MASA KINI’ (2019) 10 Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi 13.

² Ivana, ‘4 Pilar Pendidikan Menurut UNESCO Dan Contohnya: Melangkah Menuju Pendidikan Yang Lebih Berkualitas - PerpusTeknik.com’ (PerpusTeknik.com 31 October 2023) <<https://perpusteknik.com/4-pilar-pendidikan-menurut-unesco-dan-contohnya/>>. Accessed 12 Oct. 2024.



serta mengembangkan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai agama dan keimanan.

Pendidikan dapat berperan sebagai sebuah pondasi dalam menciptakan individu yang berkualitas, inovatif, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Maka dari itu, perlu adanya investasi pendidikan sejak dini, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, yang akan menjadi langkah fundamental dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, generasi tersebut diharapkan dapat menjadi pemimpin, inovator, maupun pendorong kemajuan Indonesia pada tahun 2045, yang juga bertepatan dengan peringatan satu abad kemerdekaan Indonesia.

Namun, untuk mewujudkan visi besar tersebut, Indonesia masih harus menghadapi berbagai kendala yang masih belum teratasi secara penuh hingga saat ini, khususnya terkait kualitas, aksesibilitas, akselerasi, dan inklusifitas pendidikan.

1) **Kualitas**

Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Banyak sekolah di daerah Indonesia kekurangan guru yang kompeten, dimana seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup atau tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Selain itu, fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan perpustakaan juga sangat terbatas. Kondisi ini membuat siswa di wilayah tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sama baiknya dengan siswa di kota-kota besar. Akibatnya, ada kesenjangan besar dalam kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

2) **Aksesibilitas**

Banyak anak-anak di wilayah 3T kesulitan untuk mengakses pendidikan. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya infrastruktur. Jalan menuju sekolah sering kali rusak atau tidak memadai, transportasi umum sulit ditemukan, dan jarak antara rumah dan sekolah terlalu jauh. Selain itu, walaupun ada program pemerintah seperti beasiswa atau bantuan pendidikan, banyak keluarga di daerah terpencil merasa biaya pendidikan tetap terlalu tinggi. Seperti yang diketahui bersama, setiap individu yang ingin bersekolah harus mengeluarkan uang untuk seragam, buku, alat tulis, dan biaya transportasi yang saat ini relatif tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2021, rata-rata biaya pendidikan dalam lingkup Sekolah Dasar (SD) mencapai Rp3,24 juta, kemudian

Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai Rp5,59 juta, dan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp7,8 juta.³ Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang mahal akan menyulitkan masyarakat untuk bisa menyelesaikan pendidikan lebih tinggi sehingga memungkinkan terjadinya putus sekolah, terlebih lagi jika masyarakat tersebut berasal dari kelompok pengeluaran rendah. BPS juga mencatat, rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan siswa di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan untuk semua jenjang pendidikan.

3) **Akselerasi**

Di era digital ini, pembelajaran harus lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sayangnya, banyak sekolah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, belum memiliki akses ke internet atau komputer. Hal ini membuat siswa tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar hal-hal baru yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Selain itu, kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, sehingga banyak lulusan sekolah tidak siap menghadapi tantangan di masa depan. Masalah ini harus segera diatasi agar siswa Indonesia bisa bersaing di tingkat global.

4) **Inklusifitas**

Pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang ramah untuk anak-anak ini, seperti akses jalan untuk kursi roda atau alat bantu belajar khusus. Selain itu, jumlah guru yang terlatih untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus masih sangat sedikit. Akibatnya, banyak anak dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya. Padahal, mereka juga memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang.

Beberapa aspek tersebut akan menjadi sebuah penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh Masyarakat Indonesia jika tidak segera dituntaskan, khususnya pada generasi muda, sehingga berdampak pula pada lambatnya upaya mewujudkan cita-cita Generasi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Tim Peneliti ALSA LC Unhas tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai aksesibilitas pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar. Kajian ini akan berfokus pada

³ Monavia Ayu Rizaty, 'Makin Tinggi Jenjang, Biaya Pendidikan Di Indonesia Makin Mahal' (*dataindonesia.id* 6 July 2022) <<https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/makin-tinggi-jenjang-biaya-pendidikan-di-indonesia-makin-mahal>> accessed 14 October 2024.

permasalahan aksesibilitas pendidikan di wilayah tersebut dan upaya yang diperlukan dalam rangka mendukung visi besar Generasi Indonesia Emas 2045.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi pemerataan pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo guna menunjang aksesibilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau bagi Masyarakat setempat?
2. Bagaimana pengaruh dari program pendidikan menengah dalam mengembangkan pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi pendidikan yang masih belum dituntaskan;
2. Untuk mengetahui fungsi dan peranan pemerintah serta Masyarakat dalam mengatasi sulitnya akses pendidikan bagi Masyarakat di daerah terpencil seperti yang terdapat di Pulau Kodingareng Lompo;
3. Untuk mengetahui dampak ketidaksetaraan pendidikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, terutama pada anak-anak yang putus sekolah.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif-empiris dan pendekatan deskriptif analitis. Fokus penelitian ini berada pada analisis penerapan peraturan perundang-undangan terhadap situasi hukum yang terjadi. Penelitian ini berkaitan dengan teori-teori hukum serta implementasinya dalam masalah yang timbul akibat aksesibilitas pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar. Proses penelitian ini terbagi menjadi dua tahap, pertama, analisis terhadap hukum yang berlaku dan kedua, penerapan hukum tersebut dalam kasus konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, studi pustaka, penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Untuk wawancara, dilakukan secara langsung dengan mencari beberapa informan yang tepat pada saat melakukan audiensi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih



mendalam tentang regulasi serta pentingnya hak-hak pendidikan Masyarakat yang tidak terpenuhi, terutama bagi mereka yang berada di Pulau Kodingareng Lompo. Selain itu, analisis data yang digunakan dalam kajian ini juga dilakukan secara deskriptif argumentatif, yakni dengan mempertimbangkan berbagai norma hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tim peneliti kemudian membuat kesimpulan yang merangkum inti dari topik yang telah ditetapkan, berdasarkan semua kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah; dan
8. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pemerataan Pendidikan di Pulau Kodingareng guna Menunjang Aksesibilitas Pendidikan yang Memadai dan Terjangkau bagi Masyarakat Setempat

Mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sejatinya definisi dari pendidikan sendiri ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, proses yang dimaksud dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut tidak hanya berlangsung di lingkup sekolah, tetapi juga dapat dilaksanakan dalam keluarga, lingkungan, maupun melalui pengalaman sehari-hari.⁴ Dengan pendidikan, seseorang dapat memahami dunia di sekitarnya, mengenali potensi dirinya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

Lebih dari itu, pendidikan memberikan fondasi untuk menciptakan generasi penerus yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan membantu seseorang memahami perubahan dunia dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan pendidikan, individu diajarkan untuk tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga berkontribusi untuk kebaikan bersama. Pendidikan juga membuka wawasan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga menciptakan Masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Di Indonesia, pendidikan juga menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan hingga mendorong pembangunan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, Masyarakat akan memiliki kemampuan untuk berinovasi dan berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan besar negara. Pendidikan di Indonesia sendiri mulai diperkenalkan pada masa prasejarah, ketika pembelajaran berlangsung secara sederhana dalam lingkungan keluarga. Pendidikan pada masa ini berfokus pada pengajaran keterampilan hidup, seperti bercocok tanam, berburu, dan membuat peralatan dari alam. Memasuki masa Hindu-Buddha yang berkembang sekitar abad ke-4 hingga ke-15, pendidikan menjadi lebih terstruktur namun terbatas pada golongan tertentu, seperti kasta Brahmana dan Ksatria, dengan penekanan pada ajaran agama dan filsafat. Pada masa Islam yang mulai masuk sekitar abad ke-13, sistem pendidikan

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



berkembang melalui pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama dan kehidupan sosial.⁵ Pada masa kolonial Belanda, terutama setelah diberlakukannya Politik Etis pada tahun 1901, pendidikan formal mulai diperkenalkan, meskipun diskriminatif dan hanya dapat diakses oleh golongan elit pribumi. Perjuangan tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 menjadi tonggak penting dalam melawan sistem pendidikan kolonial, dengan menekankan pendidikan berbasis budaya bangsa.⁶ Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pendidikan menjadi lebih inklusif dengan kebijakan wajib belajar, kurikulum nasional, dan berbagai program untuk meningkatkan akses pendidikan hingga ke pelosok negeri.⁷ Hingga kini, pendidikan di Indonesia terus bertransformasi, mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal.

Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang maju dan setara dengan negara-negara berkembang di dunia, dengan generasi usia produktif yang disebut sebagai 'Generasi Indonesia Emas 2045'. Generasi yang dimaksud merupakan hasil dari investasi pendidikan yang telah diterapkan oleh Masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tujuan yang jelas sebagai pedoman. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, terdapat pernyataan "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang menjadi landasan tujuan pendidikan nasional serta mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan Masyarakat yang cerdas dan merata di seluruh penjuru tanah air. Upaya pemerintah dalam mencapai Generasi Indonesia Emas 2045 terlihat melalui berbagai kebijakan, seperti penerapan kurikulum merdeka belajar, penguatan pendidikan karakter, penerapan pembelajaran jarak jauh, serta langkah-langkah strategis lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, meskipun Indonesia telah menyediakan berbagai wadah dan fasilitas untuk menempuh pendidikan bagi generasi penerus bangsa, masih ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Pentingnya aksesibilitas dalam sebuah pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu dipahami dan diimplementasikan oleh Masyarakat luas. Peran krusial pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan wajib belajar adalah menciptakan sarana

⁵ Vino Saputro S.Pd, 'Perkembangan Pendidikan Di Indonesia: Dari Masa Ke Masa - Tambah Pinter' (*Tambah Pinter* 31 March 2024) <<https://tambahpinter.com/perkembangan-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>> accessed 19 December 2024.

⁶ Ibid.

⁷ Adien, 'Pendidikan Di Indonesia: Memahami Sejarah Dan Perkembangannya' (*Sejarahkita.com* 30 September 2023) <<https://www.sejarahkita.com/2023/09/pendidikan-di-indonesia-memahami.html>> accessed 19 December 2024.



pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan Masyarakat memungkinkan terselenggaranya wajib belajar secara merata secara efektif di Indonesia. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terdapat sekitar 53,14 juta peserta didik yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia. Namun, berdasarkan data United Nations Children's Fund (Unicef) Indonesia, terdapat sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.⁸ Tentu saja hal ini menjadi hal yang kontradiktif dengan visi Indonesia sebagai negara yang ingin maju dan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada anak-anak di Indonesia agar mendapatkan hak mereka dalam belajar dan bersekolah.

Di beberapa daerah, seperti Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), tantangan dalam dunia pendidikan masih cukup besar, salah satunya adalah masalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan hasil audiensi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, angka ATS di wilayah tersebut bahkan telah mencapai sekitar 180.000 anak. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea keempat UUD 1945. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, aksesibilitas terbatas, serta minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil masih menjadi kendala utama yang harus segera diatasi. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini adalah kondisi di Pulau Kodingareng Lompo, yang juga menghadapi tantangan besar terkait aksesibilitas pendidikan, namun sangat minim pengawasan dari pemerintah Kota Makassar. Di pulau ini, menurut data dari Kelurahan Pulau Kodingareng Lompo, terdapat 63 orang yang putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah sama sekali, dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Berdasarkan hasil penelitian serta audiensi yang dilakukan oleh Tim Riset Legal Coaching Clinic ALSA LC, ada faktor signifikan yang mempengaruhi pendidikan di Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, yaitu aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan oleh Perusahaan Belanda (PT. Royal Boskalis) pada tahun 2020. Pertambangan tersebut didukung oleh kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Sulsel No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang mengatur proyek Makassar New Port yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional.⁹

⁸ Unicef Indonesia, 'Pendidikan Dan Remaja' (www.unicef.org) <<https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>>

⁹ Ayu Mukarromah and Thiya Mulyawati, 'Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut Dan Masyarakat Nelayan Di Sulawesi Selatan' (2023) 5 International Journal of Demos.



Adapun dokumen perusahaan PT. Royal Boskalis terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di tahun 2019, dimana di dalamnya diketahui bahwa para nelayan yang ada di sekitar lokasi penambangan, yakni Masyarakat Kodingareng tidak dimasukkan ke dalam Masyarakat penerima dampak tambang. Artinya, meskipun Masyarakat Kodingareng mendapat pengaruh negatif yang besar dari aktivitas penambangan pasir, mereka tidak diakui secara resmi sebagai kelompok yang terkena dampak tersebut dalam dokumen AMDAL, sehingga mereka tidak akan menerima kompensasi atas kerugian yang dialami. Hal ini dapat melanggar prinsip keterlibatan Masyarakat yang diatur dalam peraturan tentang izin lingkungan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menegaskan perlunya sosialisasi dan pelibatan Masyarakat dalam setiap kegiatan yang dampak lingkungan. Akan tetapi, melalui keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel pada agenda FGD, mengatakan bahwa pihak mereka tidak mengetahui akan hal tersebut dan beranggapan bahwa ini adalah tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang kemudian menjadikan ketidakterlibatan Masyarakat ini sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan dokumen AMDAL berikutnya.

Akibat dari aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan PT. Royal Boskalis, terjadi penurunan pendapatan bahkan krisis ekonomi yang dirasakan oleh Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kerusakan pekarangan biota laut dan wilayah tangkapan ikan di sekitar pulau tersebut mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi warga. Menurut hasil audiensi bersama Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, mayoritas Masyarakat mengakui jika aktivitas penambangan pasir yang dilakukan telah menyebabkan banyak dari keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.

B. Pengaruh Kehadiran Program Pendidikan Menengah dalam Mengembangkan Pendidikan di Pulau Kodingareng

Pendidikan memiliki peran krusial dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensinya untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28 UUD 1945 mencantumkan 10 hak dasar warga negara, salah satunya adalah hak atas pendidikan yang dapat diwujudkan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.¹⁰ Selain itu, Pasal 33 ayat (1) juga memperkuat hak Masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Provinsi Sulawesi Selatan, jaminan akses pendidikan diatur lebih lanjut dalam Perda Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Menengah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan Masyarakat. Selanjutnya, Pasal 11 Perda tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan program wajib belajar Pendidikan Menengah bagi seluruh Masyarakat.¹¹ Dalam konteks Perda Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah, pendidikan menengah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan formal ini mencakup berbagai bentuk satuan pendidikan, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan sekolah luar biasa untuk jenjang pendidikan menengah. Selain jalur formal, pendidikan menengah juga dapat diselenggarakan melalui jalur nonformal, yang meliputi program pendidikan kesetaraan seperti Paket C, yang setara dengan SMA atau SMK. Jalur nonformal ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat yang tidak dapat mengakses jalur formal untuk tetap mendapatkan pendidikan menengah.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan menengah melalui jalur formal dan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU No. 20 Tahun 2003 bertujuan untuk memastikan perluasan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh Masyarakat, khususnya daerah terpencil seperti Pulau Kodingareng Lompo. Dalam situasi ini, kehadiran pendidikan menengah yang terjangkau dan inklusif menjadi sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Dua langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pemberian program pendidikan kesetaraan melalui Paket C dan pembangunan SMA Negeri di Pulau Kodingareng Lompo. Program pendidikan kesetaraan seperti Paket C dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi individu yang tidak dapat melanjutkan jenjang sekolah melalui jalur formal. Program ini menawarkan fleksibilitas dalam metode pembelajaran, menjadikannya solusi yang adaptif untuk Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo yang menghadapi keterbatasan ekonomi, waktu, dan aksesibilitas. Melalui Paket C, anak-anak dan remaja yang mengalami putus sekolah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setara jenjang SMA. Tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan akademik, program ini juga membuka

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah



peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja, sehingga berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

Agar implementasi Paket C di Pulau Kodingareng Lompo dapat berjalan optimal, pemerintah daerah harus menjadikannya prioritas strategis dengan menyediakan tenaga fasilitator yang kompeten, bahan ajar yang komprehensif, serta lokasi belajar yang strategis dan mudah dijangkau. Selain itu, pelibatan aktif komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan memastikan keberhasilan program secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan sinergi antara pendidikan kesetaraan dan pembangunan sosial-ekonomi Masyarakat setempat.

Selain pendidikan nonformal, keberadaan lembaga pendidikan formal seperti SMA Negeri di Pulau Kodingareng Lompo merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pendidikan menengah bagi Masyarakat setempat. Saat ini, anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dihadapkan pada tantangan besar berupa kebutuhan untuk menyeberang ke Kota Makassar, yang memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang berada di luar jangkauan mayoritas keluarga nelayan. Pembangunan SMA negeri di Pulau Kodingareng Lompo tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih terjangkau dan efisien, tetapi juga berpotensi menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, stabil, dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Lebih dari sekadar institusi pembelajaran, SMA negeri di Pulau Kodingareng Lompo dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan komunitas dengan menyediakan program keterampilan praktis yang kontekstual dan berbasis potensi lokal. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan, pengolahan hasil laut, serta teknologi kelautan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan pendekatan ini, lulusan SMA tidak hanya memiliki bekal akademik, tetapi juga keterampilan fungsional yang dapat mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kapasitas Masyarakat untuk beradaptasi dengan tantangan global.

Keberadaan pendidikan menengah, baik melalui program kesetaraan seperti Paket C maupun melalui pembangunan SMA negeri, memiliki dampak multidimensional terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo. Secara individual, pendidikan menengah meningkatkan peluang generasi muda untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau mengakses pekerjaan yang lebih produktif, sehingga dapat memutus siklus kemiskinan antar-generasi. Pada skala yang lebih luas, pendidikan berperan dalam membangun modal sosial

Masyarakat, mendorong peningkatan kapasitas manusia, dan menciptakan komunitas yang lebih mandiri serta berdaya saing.

Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat kesadaran Masyarakat akan pentingnya keberlanjutan ekosistem, terutama di wilayah yang terdampak aktivitas tambang pasir seperti Pulau Kodingareng Lompo. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelestarian lingkungan, pendidikan menengah dapat menjadi instrumen penting dalam membangun komunitas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekologis.

Pemerintah Provinsi Sulsel Selatan perlu mengambil langkah proaktif dalam memastikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebijakan pemberdayaan Masyarakat lokal. Pembangunan SMA negeri harus dirancang sebagai bagian dari pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada integrasi dengan kebutuhan ekonomi dan sosial Masyarakat setempat.

Dengan mengadopsi kebijakan pendidikan yang inklusif, terukur, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, diharapkan Pulau Kodingareng Lompo dapat menjadi modal keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan. Pendidikan yang merata tidak hanya akan menciptakan generasi muda yang kompeten, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi seluruh Masyarakat pulau.

Meskipun berbagai solusi telah dirancang untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program-program tersebut. Berikut ini adalah uraian mengenai tantangan utama yang dihadapi:

1) Keterbatasan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Negeri

Salah satu kendala terbesar dalam mendirikan SMA Negeri di Pulau Kodingareng Lompo adalah keterbatasan lahan. Dalam kegiatan FGD yang menghadirkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mengatakan bahwa sebagai wilayah kecil dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, ruang yang tersedia untuk infrastruktur baru, termasuk fasilitas pendidikan, sangat terbatas. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk merancang solusi inovatif, seperti pemanfaatan bangunan yang sudah ada atau membangun sekolah dengan konsep vertikal untuk menghemat ruang. Namun daripada kendala tersebut, Disdik

Kota juga telah berkomitmen untuk melakukan uji kelayakan agar dapat diteliti lebih mendalam apakah memungkinkan untuk dibuatkan SMA Negeri di Pulau Kodingareng.

2) Aksesibilitas Pendaftaran Program Paket C yang Terbatas

Bagi Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, pendaftaran program Paket C seringkali terkendala oleh biaya akomodasi dan transportasi yang harus dikeluarkan untuk mengurus administrasi ke wilayah daratan, menurut pengurus Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) Harapan Kodingareng Pulau Kodingareng Lompo, anak yang ingin mengikuti ujian Paket C harus membayar sebesar Rp500.000-Rp800.000 untuk menyeberang ke daratan. Hal ini menambah beban ekonomi bagi keluarga yang sudah berada dalam kondisi rentan. Selain itu, kurangnya informasi yang tersampaikan secara efektif kepada Masyarakat mengenai program ini memperparah kesulitan akses. Pemerintah perlu menyederhanakan proses pendaftaran dengan menghadirkan layanan administratif di pulau tersebut, baik melalui program jemput bola oleh dinas terkait atau menggunakan platform digital yang mudah diakses.

3) Penurunan Minat Belajar Anak-Anak

Salah satu tantangan signifikan adalah menurunnya minat belajar anak-anak di Pulau Kodingareng Lompo. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, dan minimnya dorongan dari lingkungan sekitar. Pada kegiatan FGD perwakilan Masyarakat menyampaikan jika anak-anak cenderung lebih memilih untuk membantu orang tua bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan mereka. Untuk mengatasi ini, diperlukan program yang lebih menarik, seperti pengintegrasian pendidikan berbasis teknologi atau kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kreativitas dan keterampilan praktis dapat menjadi motivasi tambahan bagi anak-anak.

4) Kurangnya Dukungan dari Masyarakat dan Orang Tua

Dukungan dari Masyarakat dan orang tua merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan, namun di Pulau Kodingareng Lompo, hal ini masih menjadi kendala. Banyak orang tua yang kurang memahami pentingnya



pendidikan menengah sebagai investasi masa depan anak-anak mereka. Sebagian besar fokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek, sehingga pendidikan sering dianggap sebagai prioritas kedua. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh Masyarakat dan pemimpin lokal dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Program edukasi kepada orang tua mengenai manfaat jangka panjang pendidikan juga perlu digalakkan secara intensif.

5) **Kurangnya Solusi Pemerintah dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan**

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pendidikan, implementasi di Pulau Kodingareng Lompo masih jauh dari optimal. Minimnya perhatian pemerintah dalam menyediakan solusi konkret untuk mengatasi masalah pendidikan, seperti membangun infrastruktur atau memberikan bantuan ekonomi langsung, menjadi hambatan utama. Selain itu, tidak adanya strategi komprehensif yang dirancang khusus untuk wilayah kepulauan mengakibatkan program-program pendidikan sulit diaplikasikan secara efektif. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis bukti untuk menanggulangi tantangan pendidikan di wilayah ini, termasuk alokasi anggaran khusus untuk daerah kepulauan dan kerja sama dengan lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah dalam mendukung program pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerataan pendidikan adalah salah satu tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Pulau Kodingareng Lompo. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Namun, akses pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo masih sangat terbatas. Banyak anak yang harus putus sekolah, terutama pada usia 15-19 tahun, karena berbagai kendala seperti biaya, lokasi sekolah yang jauh, hingga kurangnya sarana pendidikan. Masalah ini semakin diperburuk oleh aktivitas tambang pasir yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis. Tambang ini telah merusak ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan secara langsung mempengaruhi perekonomian Masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Ketika pendapatan berkurang, pendidikan anak-anak menjadi salah satu korban utama karena keluarga tidak mampu membayar biaya sekolah. Selain itu, dokumen AMDAL dari aktivitas tambang ini tidak melibatkan Masyarakat sebagai pihak terdampak, sehingga suara mereka sering diabaikan. Masalah ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya membutuhkan pembangunan sekolah, tetapi juga perhatian serius terhadap masalah sosial dan ekonomi yang mendasarinya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, ada dua langkah utama yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan pendidikan kesetaraan melalui program Paket C. Program ini dirancang untuk membantu mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Pemerintah daerah harus mendukung program ini dengan menyediakan tenaga pengajar, bahan ajar, serta tempat belajar yang nyaman dan mudah dijangkau. Selain itu, kurikulum Paket C juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat lokal agar lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Kedua, membangun SMA Negeri di Pulau Kodingareng Lompo. Dengan adanya SMA negeri, anak-anak di pulau ini tidak perlu lagi pergi ke daratan untuk melanjutkan pendidikan. Selain mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi, keberadaan SMA negeri juga dapat menciptakan peluang belajar yang lebih stabil dan terarah. Sekolah ini dapat memasukkan pelajaran yang relevan dengan potensi lokal, seperti keterampilan kelautan dan kewirausahaan, untuk memberdayakan generasi muda dan membantu mereka menciptakan peluang kerja di masa depan.

Pendidikan di Pulau Kodingareng Lompo bukan hanya tentang memberikan ilmu kepada individu, tetapi juga tentang membangun masa depan Masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih baik, Masyarakat dapat memutus siklus kemiskinan yang telah berlangsung lama. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama di wilayah yang terdampak tambang seperti Pulau Kodingareng Lompo. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulsel harus bertindak tegas dengan memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas tambang harus diperketat agar dampak buruknya dapat diminimalkan. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam proses AMDAL, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kerjasama antara Masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya, Pulau Kodingareng Lompo dapat menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan, lingkungan, dan ekonomi dapat berjalan beriringan demi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Riset CLCC ALSA LC Unhas terkait dengan topik ini, serta mengacu pada poin komitmen yang telah disepakati bersama dengan pihak Disdik Kota Makassar, Dinas ESDM Provinsi Sulsel, Yayasan PKBM Harapan Kodingareng, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH), NGO Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel, dan perwakilan Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, maka dari itu ALSA LC Unhas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait untuk:

1. Dalam mengeluarkan izin atas sebuah pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar harus melakukan analisa yang lebih mendalam terkait dengan dampak lingkungan dan dampak sosial yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari;
2. Dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan, pihak DLH harus melibatkan secara aktif dari pihak Masyarakat yang memungkinkan terdampak akibat kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga tidak ada pihak yang dikemudian hari merasa dirugikan;
3. Pihak ESDM Provinsi Sulsel harus sering melakukan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya aktivitas dari pertambangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan;



4. Pihak Disdik Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan pengadaan SMA Negeri di Pulau Kodingareng untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah dan menciptakan aksesibilitas pendidikan tingkat SMA yang luas bagi Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo;
5. Untuk menyongsong dan mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel perlu melakukan percepatan pemerataan pendidikan sesegera mungkin melalui kerjasama dengan semua pihak yang terkait, khususnya pada wilayah 3T seperti Pulau Kodingareng Lompo;
6. DPRD Provinsi Sulsel harus lebih proaktif dalam menyikapi segala permasalahan sosial yang terjadi pada Masyarakat, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan tidak berkepanjangan;
7. Perangkat Desa dan semua pihak di Pulau Kodingareng harus lebih menggiatkan edukasi melalui sosialisasi akan pentingnya pendidikan kepada Masyarakat Pulau Kodingareng untuk meningkatkan dan menciptakan minat belajar untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kepada Masyarakat; dan
8. Seluruh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan harus memperjuangkan pemenuhan hak-hak Masyarakat pulau yang telah diatur dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah

Jurnal

Ayu Mukarromah and Thiya Mulyawati, 'Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut Dan Masyarakat Nelayan Di Sulawesi Selatan' (2023) 5 International Journal of Demos.

Usboko K, 'MODEL PENDIDIKAN MASA KINI' (2019) 10 Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi 13.

Artikel Online

Adien, 'Pendidikan Di Indonesia: Memahami Sejarah Dan Perkembangannya' (*Sejarahkita.com* 30 September 2023) <<https://www.sejarahkita.com/2023/09/pendidikan-di-indonesia-memahami.html>> accessed 19 December 2024.

Ivana, '4 Pilar Pendidikan Menurut UNESCO Dan Contohnya: Melangkah Menuju Pendidikan Yang Lebih Berkualitas - PerpusTeknik.com' (*PerpusTeknik.com* 31 October 2023) <<https://perpusteknik.com/4-pilar-pendidikan-menurut-unesco-dan-contohnya/>>. Accessed 12 Oct. 2024.

Monavia Ayu Rizaty, 'Makin Tinggi Jenjang, Biaya Pendidikan Di Indonesia Makin Mahal' (*dataindonesia.id* 6 July 2022) <<https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/makin-tinggi-jenjang-biaya-pendidikan-di-indonesia-makin-mahal>> accessed 14 October 2024.

Unicef Indonesia, 'Pendidikan Dan Remaja' (www.unicef.org) <<https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>>

Vino Saputro S.Pd, 'Perkembangan Pendidikan Di Indonesia: Dari Masa Ke Masa - Tambah Pinter' (*Tambah Pinter* 31 March 2024) <<https://tambahpinter.com/perkembangan-pendidikan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>> accessed 19 December 2024.